

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Kahar Badjuri dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategis*, UNDIP, Semarang.

Abdul Wahab, Solihin, 2012, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

_____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Binder, Brian, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Chalid, Pheni 2005, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan)*, Kemitraan, Jakarta.

Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah (Pedoman Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerinatah dan 15 Permendagri)*, Indeks, Jakarta.

Davey, Kenneth, 1989, *Keuangan Pemrintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Elmi, Bahrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta

Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konpress, Jakarta.

Huda, Ni'matul, 2009, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Probelematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

J. Kaloh, 2002, *Mencari bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tanggung Jawab Global*, Rineka Cipta, Jakarta.

Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta Karya, Bandung.

- Kumorotomo, Wahyudi, 2008, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Kencana, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrjajad, 2004, *Otonomi dan Pemabangunan Daerah*, reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
- M. Bird, Richard and Francois Vaillancourt, 2000, *Fiscal Decentralitation in Developing Countries (Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara berkembang)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Situmorang, Victor, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daaerah*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Manor, James, 1999, *The Political Economy of Democratic Decentralisation*, Wold Bank, Washintong.
- Maria S.W. Sumaerdjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik “Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Di Indonesia”*, Averroes Press, Malang.
- Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta,
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metedologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori ddan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Prasojo, Eko, 2011, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004), BPHN Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, *Penelitian*.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Riyanto, Sigit, dkk, 2013, *Keterampilan hukum: Panduan Untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ruslan, Achmad, 2013, *Teori dan Panduan Praktik pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- Salmon A. Situmeang, 2006, Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai Dana Perimbangan dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2003-2005 Perspektif UU No 22/1999 DAN UU No 33/2004, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Tesis*.
- Soebechi, Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surianingrat, Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan Di Indoensia Suatu analisis*, Dewa Ruci Press, Jakarta
- Wignosubroto, Sotendyo dkk, 2005, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for local Development Yayasan,
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik "Teori dan Proses"*, MedPress, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Pangkep, dalam Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Pangkep

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Pangkep, dalam Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Pangkep

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan dikaitkan dengan masalah defisit di Kabupaten Pangkep.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun anggaran 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1203.

C. Internet

Academia, https://www.academia.edu/4694245/Pengertian_Jenis-jenis_dan_Tingkat_tingkat_Kebijakan_Publik, diakses pada tanggal 05 Mei 2017, dikutip dalam Moch Icbal, 2014, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2014, Jakarta.

APBN-P 2016, *Mempercepat Pembangunan untuk memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*, <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-p-2016/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

Fajar, *Proyek Tak Terlalu Penting Dihapus*, <http://upeks.fajar.co.id/2016/11/10/proyek-tak-terlalu-penting-dihapus/>, diakses pada tanggal 21 desember 2017.

Hukum Online, *Alasan Pemerintah Tentukan Daerah Terkena Penundaan Penyaluran DAU*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bfe6282c0db/ini-alasan-pemerintah-tentukan-daerah-terkena-penundaan-penyaluran-dau>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2017.

Kareba Toraja, *TAPBD Perubahan Tana Toraja 2017 Naik Rp102 Milliar*, <https://www.karebatoraja.com/apbd-perubahan-tana-toraja-2017-naik-rp102-miliar/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

LIPI, <http://lipi.go.id/lipimedia/anggaran-negara-untuk-kepentingan-rakyat/16217>, diakses pada tanggal 13 Juni 2017.

Local Odpm, <http://www.Local.odpm.gov.uk/greenpap/part1.htm>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017.

Lutimterkini, *Serapan anggaran pemkab Lutim*, <http://lutimterkini.com/berita-serapan-anggaran-pemkab-lutim-semester-i-baru-22-20-.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Maya Rostanty, *Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah*, <http://pattiro.org/2016/08/dampak-penundaan-sebagian->

transfer-dau-2016-terhadap-pelayanan-publik-di-daerah/, diakses pada tanggal 1 Januari 2018.

News Rakyatku, <http://news.rakyatku.com/read/18869/2016/08/30/gubernur-sulsel-baru-tahu-dau-4-kabupaten-ditunda>, diakses pada tanggal 14 Juni 2017.

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 35/KLI/2016, Tanggal 15 Agustus. Lihat <https://www.kemenkeu.go.id/media/3434/sp-rapbn-2016-150816.pdf>, diakses pada tanggal 1 Januari 2018

Sumsel Tribun news, <http://sumsel.tribunnews.com/2016/10/10/siska-marleni-penundaan-pencairan-dau-2016-berdampak-terhadap-ketidakpastian-rapbd-2017>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

Tajuddin Mustaming/pojoksulsel, <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/08/28/ini-dia-besaran-dau-pangkep-yang-dipotong-selama-4-bulan/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2017.